

Draft Resolusi Konflik Penyelesaian Konflik Perang Sipil di Libya Tahun 2011

Draft Conflict Resolution for the Settlement of the Civil War Conflict in Libya in 2011

Bagaskara

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

(*Email Korespondensi: bagaskara530@gmail.com)

Abstrak

Libya sebagai sebuah bangsa telah menjadi negara yang terkena dampak Arab Spring. Dampak gelombang demokrasi yang melanda seluruh negeri menjadi salah satu penyebab terjadinya perang saudara di Libya. Pemerintahan rezim otoriter Qaddafi juga memperburuk situasi dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan akan sistem demokrasi yang fundamental. Konflik Libya terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu pendukung Khadafi dan kubu oposisi. Ada negara lain yang terlibat dalam perang saudara Libya dan membuat konflik semakin parah.

Kata Kunci: Libya, Musim Semi Arab, Perang Saudara, Qaddafi, Gelombang Demokrat

Abstract

Libya as a nation has become a country that affected by the Arab Spring. The impact of the democratic wave that swept all over the country has been one of the reasons of the Libya's civil war. Qaddafi's otoritarian regime administration also aggravate the situation and thus increase the want of fundamental democratic system. Libya's conflict was divided into two sides which were the Qaddafi's loyalist and the opposition. There were other countries that were involved within the Libya's civil war and had made the conflict worsen.

Keywords: Libya, Arab spring, Civil war, Qaddafi, Democratic wave

PENDAHULUAN

Libya terletak di Afrika Utara yang berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, dan Toubou. Konflik di Libya ini menarik untuk kita pelajari karena tidak seperti umumnya konflik yang terjadi di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain (1).

Menurut Paul Tiyambe Zeleza, tipikal konflik di Afrika tidaklah terlalu berbeda dengan konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang membedakan hanya banyaknya jumlah konflik yang terjadi di satu benua Afrika saja (Williams, 2011). Bahkan, sejak tahun 1970, terjadi lebih dari 30 perang di benua ini. Di tahun 1996 saja, 14 dari 53 negara di Afrika terlibat dalam konflik bersenjata, di mana jumlah ini mengakibatkan 8 juta pengungsi dan internal displaced persons (Welsh, 2004). Praktis hanya beberapa negara saja yang tidak terlalu parah mengalami konflik, itu pun tetap ada konflik walaupun dalam skala minor. Akan tetapi, sebab konflik di Libya sangatlah berbeda. Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya (Salma, 2012). Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini (2).

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (3). Jenis penelitian ini digunakan karena menyangkut penelitian yang mendeskripsikan fakta empiris dengan kata-kata. Data primer dalam penelitian ini adalah adat Buol yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekundernya adalah berupa tulisan, jurnal, artikel dan manuskrip.

HASIL DAN PENELITIAN

Sejarah Konflik

Konflik di Libya mulai terjadi pada bulan Februari 2011, lebih tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011 dikarenakan adanya penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah (4). Munculnya demonstrasi dan pemberontakan ini bukan sekedar karena masalah kebebasan, namun juga karena faktor ekonomi. Kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang semakin tinggi memicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan presiden Muammar Qaddafi. Qaddafi sendiri dianggap telah melakukan korupsi selama 41 tahun pemerintahannya. Sebagai presiden yang telah menjabat dalam kurun waktu yang lama, Qaddafi dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dalam kebijakannya. Meskipun Libya merupakan salah satu negara Arab yang kaya akan minyak tetapi kekayaan sumber daya alam ini tidak mengalir kepada rakyat. Sebagian besar pendapatan negara dari minyak justru masuk ke dalam pundi-pundi Qaddafi, keluarga Qaddafi, serta para kroninya (5).

Faktor atau permasalahan lain yang menyebabkan mengapa sebagian besar masyarakat Libya menginginkan adanya revolusi di negerinya (Syahputra, 2017), yaitu: 1) Di kalangan masyarakat Libya sendiri terdapat sembilan kelompok anti- Qaddafi yang berpangkalan di luar negeri yakni: Front Libya Demokratis (LDF) berpangkalan di AS; Tentara Pembebasan Nasional (NSA) berpangkalan di London; Gerakan Nasional Libya (LN) di Baghdad; Organisasi Pembebasan Libya (OLL) di Mesir; Persatuan Konstitusi Libya (LCU) di London; Perkumpulan Nasional Libya Demokratis (LDNR) di Kairo; Persatuan Umum Mahasiswa Libya (GULS) mempunyai cabang di beberapa negara, antara lain AS, Inggris, Yunani, Jerman, Italia, Maroko, dan Mesir; Persekutuan Islam Libya (IAL) di AS; dan Front Nasional bagi Pembebasan Libya (NFSL). 2) Adanya pengontrolan terhadap media baik milik pemerintah ataupun swasta. 3) Kehidupan glamour dari keluarga Qaddafi yang menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya tidak sedikit melalui praktik korupsi yang dilakukan. 4) Qaddafi kurang mentoleransi adanya perbedaan pendapat, bahkan sangat represif terhadap lawan politiknya 5) Penangkapan aktivis HAM bernama Fathil Terbil yang menyuarakan aspirasinya menuntut pergantian pemerintahan yang lebih demokratis dan menginginkan penegakan HAM di Libya (6).

Masyarakat Libya yang berdemonstrasi ini menyerukan pergantian kepemimpinan dan meminta diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari kemudian jumlah warga yang protes semakin banyak. Pada tanggal 17 Februari, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Qaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Qaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berubah menjadi kerusuhan (7).

Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Qaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Disamping dengan menggunakan kekuatan militer, Qaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata. Bahkan, pada tanggal 22 Februari, *The Economist* menggambarkan protes di Libya sebagai “pemberontakan untuk merebut kembali Libya dari tangan otokrat yang paling lama memimpin di dunia” (2).

Dalam konflik ini masyarakat Libya terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu loyalis Qaddafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council) (Syahputra, 2017). Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Kubu loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi sementara kubu oposisi atau NTC yang dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya (Indrawan, 2013). Aksi saling menyerang antara dua kubu ini pun tak terelakkan. Qaddafi mengecam dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagai gerakan pemberontak. Gerakan pemberontak yang menuntut Qaddafi untuk turun ini disebut sebagai gerakan revolusioner. Qaddafi lebih memilih pendekatan represif dalam menangani krisis politik tersebut. Qaddafi mengerahkan tentara sewaan dari Chad, Niger, dan Korea Utara untuk menembaki para demonstran.

Sampai dengan akhir Februari jumlah korban tewas akibat dari serangan pihak pemerintahan Qaddafi diperkirakan mencapai 300 orang, termasuk 111 tentara dan 139 warga sipil (Liputan6, 2011). Atas tindakan tersebut, International Criminal Court (ICC) memperingatkan Qaddafi dan anggota pemerintahannya bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. International Federation for Human Rights (FIDH) menyimpulkan bahwa Qaddafi telah menerapkan strategi bumi hangus.

Akibat dari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan membuat PBB melalui Dewan Keamanan melakukan sidang terkait situasi Libya yang semakin memburuk. Sidang dilakukan 2 kali, sidang pertama menghasilkan Resolusi DK PBB No.S/RES/1970 namun dalam pelaksanaannya Libya tidak mematuhi Resolusi tersebut dimana pemerintahan Qaddafi terus melakukan serangan senjata terhadap masyarakat sipil, terutama melalui udara. Maka pada tanggal 17 Maret 2011 diterbitkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 untuk mengantisipasi berlanjutnya pelanggaran HAM yang terjadi di Libya. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.S/RES/1973 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tersebut, membuat North Atlantic Treaty Organization (NATO) menginterpretasikan untuk melakukan Humanitarian Intervention di Libya untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di seluruh dunia terutama negara yang sedang berkonflik ketika tidak dapat menanggulangi atau menyelesaikan permasalahannya (8).

Untuk lebih memahami jalannya konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011, penulis akan menjelaskan lebih lanjut lagi dan membuktikan jalannya konflik ini dengan menggunakan tahapan konflik Eric Brahm. Menurut tahapan konflik yang dituliskan Eric Brahm, setidaknya ada 7 tahapan konflik, yaitu: latent conflict, conflict emergence, conflict escalation, stalemate, de-escalation, dispute settlement, dan post-conflict. Dalam kasus perang sipil di Libya ini telah mencapai tahapan yang paling akhir yaitu post-conflict, yang mana kita dapat mengetahui apa yang terjadi setelah perang sipil ini berakhir.

Aktor dan Pola Hubungan

Pada awal konflik yang terjadi di Libya ini hanya melibatkan 2 kubu, yaitu kubu loyalis Qaddafi/pemerintah dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council)

(Syahputra, 2017). Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Kubu loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi sementara kubu oposisi atau NTC yang dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya (Indrawan, 2013). Aksi saling menyerang antara dua kubu ini pun tak terelakkan. Qaddafi mengancam dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagaigerakan pemberontak sedangkan gerakan pemberontak yang menuntut Qaddafi untuk turun ini disebutsebagai gerakan revolusioner. Seiring dengan pecahnya konflik dan semakin banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang sipil di Libya ini, akhirnya PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 untuk mengantisipasi berlanjutnya pelanggaran HAM yang terjadi di Libya. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.S/RES/1973 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tersebut, membuat North Atlantic Treaty Organization (NATO) menginterpretasikan untuk melakukan Humanitarian Intervention di Libya untuk menciptakan keamanan dan kedamaian. Disinilah munculnya aktor baru atau kubu baru yaitu kubu koalisi yang terdiri dari gabungan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan NATO (8).

Kepentingan-kepentingan Aktor

Untuk mengetahui kepentingan-kepentingan, posisi, dan semua kebutuhan dari pihak-pihak yang berkonflik, penulis akan menggunakan analogi bawang bombay. Analogi ini bertujuan untuk mencari titik kesamaan diantara pihak-pihak yang berkonflik serta untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak-pihak tersebut.

Seperti yang tertera pada bagan diatas jika posisi dari ketiga aktor atau kubu yang sedang berkonflik ini memiliki kontradiksi yang kuat, dimana kubu loyalis sangat mendukung kepemimpinan Qaddafi dan berusaha memerangi pemberontakan yang dilakukan oleh kubu oposisi. Sedangkan kubu oposisi sangat menentang kepemimpinan Qaddafi yang dianggap telah merugikan rakyat Libya dan kubu koalisi berada dipihak kubu oposisi, koalisi juga menganggap jika Qaddafi telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Libya. Bagi kubu loyalis sendiri, Qaddafi dianggap sebagai pemimpin yang baik dan orang-orang yang berada pada kubu loyalis ini menganggap Qaddafi sebagai pahlawan dan penolong yang telah memimpin Libya selama 41 tahun. Qaddafi sendiri dianggap telah memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan menjadikan Libya sebagai negara yang mandiri dibawah kepemimpinannya (9).

Ketiga kubu ini sendiri juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kubu loyalis sendiri memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi. Qaddafi sebagai pemimpin dari kubu ini bahkan tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militer dalam mempertahankan kekuasaannya. Ia bahkan mengerahkan tentara sewaan dari Chad, Niger, dan Korea Utara untuk menembaki para demonstran/kubu oposisi(Azra, 2011). Sedangkan kubu oposisi sendiri memiliki kepentingan untuk diadakannya revolusi di Libya dan menginginkan Qaddafi mundur dari jabatannya sebagai presiden Libya yang dianggap tidak mampu lagi untuk memimpin Libya. Dan dari kubu koalisi sendiri memiliki kepentingan yang lain, yaitu selain untuk membantu kubu oposisi dengan alasan kemanusiaan, mereka juga memiliki kepentingan lain seperti untuk memiliki pengaruh di wilayah Libya dan kepentingan kapitalis yang berkaitan dengan ladang minyak yang dimiliki Libya.

Ketiga aktor/kubu yang sedang berkonflik ini memiliki kebutuhannya masing- masing dari konflik ini. Yang dibutuhkan oleh kubu loyalis adalah memerangi pemberontakan yang terjadi agar kepentingannya dapat tercapai. Sama dengan kubu loyalis, kubu oposisi dan koalisi juga harus memenangkan konflik yang sedang terjadi demi tercapainya kepentingan mereka yaitu menjatuhkan kekuasaan Qaddafi, tetapi bedanya disini kubu koalisi memiliki maksud atau motif lain kenapa ia membantu kubu oposisi memenangkan konflik, yaitu demi mendapatkan minyak yang terkandung di Libya dan agar memiliki pengaruh yang kuat di wilayah negara (10).

Gaya dan Taktik Aktor

Dalam menelaah gaya dan taktik aktor dalam konflik ini, penulis akan menjelaskannya dengan menggunakan Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) yang dibawa oleh Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann. Menurut mereka ada 2 dimensi; assertiveness level

dan cooperative level yang mana dibedakan menjadi 5 gaya, yaitu: avoiding, accommodating, compromising, competing, dan collaborating (11).

Menurut gambar di atas, gaya dan taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam perang sipil di Libya ini adalah competing dan avoiding. Pihak loyalis Qaddafi dan pihak NTC (oposisi) sendiri menggunakan gaya dan taktik competing, yang mana mereka melakukan perang dan penggunaan senjata kepada satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan yang ada di Libya. Loyalis Qaddafi memiliki tujuan untuk mempertahankan kedaulatan presiden Qaddafi dengan melakukan penyerangan terhadap kubu NTC (oposisi), sedangkan kubu oposisi (NTC) melakukan perlawanan dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Qaddafi yang sangat otoriter dan tidak mensejahterakan masyarakat.

Ketika kekalahan terjadi di kubu NTC (oposisi), lalu masuklah pihak ketiga yaitu PBB yang mengeluarkan resolusi untuk perang sipil yang terjadi di Libya. PBB sendiri memberikan penawaran bagi Qaddafi untuk segera pergi meninggalkan Libya karena dirasa Qaddafi telah kehilangan legitimasi nya untuk memimpin Libya dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat Libya sendiri tetapi Qaddafi lebih memilih menolak dan malah tetap melakukan penyerangan terhadap kubu oposisi (9). Dari sini dapat kita lihat jika Qaddafi sendiri menggunakan gaya dan taktik avoiding.

Alternatif Resolusi Konflik

Berdasarkan pemaparan konflik, aktor, kepentingan, dan hal-hal lainnya yang termasuk dalam konflik perang sipil di Libya tahun 2011, maka langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah:

Negosiasi, proses negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang berkonflik melakukan komunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka dengan mempertimbangkan keuntungan dalam perspektif masing-masing. Negosiasi dilakukan tanpa bantuan siapapun atau tanpa adanya pihak lain, proses ini dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang berkonflik saja untuk mencapai suatu kesepakatan perundingan damai antara kedua belah pihak.

Mediasi, merupakan proses penyelesaian konflik melalui proses perundingan antara para pihak yang berkonflik dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses ini adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus, maka tidak boleh adanya paksaan untuk menerima atau menolak gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari semua pihak yang berkonflik.

Proses neutral evaluation ini hampir sama dengan proses mediasi dan negosiasi, pihak ketiga tetap dibolehkan untuk memberikan rekomendasi dan boleh menentukan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Namun, keputusan dari pihak ketiga tidak mengikat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik sipil yang terjadi di Libya terjadi karena kediktatoran Qaddafi yang memimpin Libya selama 41 tahun dan juga karena korupsi yang dilakukan oleh Qaddafi, masyarakat Libya berdemo meminta pergantian kepemimpinan dan meminta diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Aksi unjuk rasa ini pun semakin menjadi-jadi dan merambat hampir ke seluruh negeri, dan pada akhirnya ini membuat Qaddafi menjadi khawatir jika kepemimpinannya akan digantikan. Maka dari itu Qaddafi memerintahkan pasukan militernya melakukan kekerasan kepada warga sipil yang menentang pemerintahannya dan menganggap itu sebagai aksi pemberontakan. Dalam konflik ini masyarakat Libya terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu loyalis Qaddafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council), 2 kubu ini memiliki kepentingan dan tujuan yang kontradiktif. Kubu loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi sementara kubu oposisi atau NTC menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya

DAFTAR PUSTAKA

1. Fahrullah TA. Libya Sebuah Negara Arab Republik di Benua Afrika. Pros Pertem Ilm Int Bhs Arab. 2019;

2. Indrawan J. Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *J Kaji Wil.* 2016;4(2):127–49.
3. Raco J. Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. 2018;
4. Sakila INF. Peran Al-Jazera dalam transformasi politik tunisia pada peristiwa arab Spring 2010-2011.
5. ANDRIANTO A. kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Hugo Chavez Di Venezuela (1999-2011). Skripsi Yogyakarta Progr Stud Pendidik Sej Jur Pendidik Sej Fak Ilmu Sos Univ Negeri Yogyakarta. 2012;
6. Abbas AF. Pemikiran politik Mu’ammar Qadhafi.
7. Amri U. Masa Depan Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak. Skripsi Fak Ilmu Sos dan Ilmu Polit Jur Ilmu Hub Int Univ Hasanuddin. 2014;
8. Prajaya MPA. Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (Nato) Dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional Di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafi. *Kumpul J Mhs Fak Huk.* 2014;1(11).
9. Muningsar P. MUAMMAR KHADAFI: KAJIAN TENTANG KEPEMIMPINANNYA DI LIBYA (1969-2011). Yogyakarta; 2013.
10. Jahroni J. Memahami Terorisme: sejarah, konsep dan model. Prenada Media; 2016.
11. Compact C. Educating citizens. Build communities Washington, DC Board Dir. 2011;